

DEKLARASI PEMIMPIN G20 BALI

Bali, Indonesia, 15-16 November 2022

1. Empat belas tahun lalu, para Pemimpin G20 bertemu untuk pertama kalinya, menghadapi krisis keuangan terparah di generasi kita. Kami menyadari, sebagai ekonomi global yang besar, bahwa secara kolektif kami memikul tanggung jawab dan bahwa kerja sama kami diperlukan untuk pemulihan ekonomi global, untuk mengatasi tantangan global, dan meletakkan dasar untuk pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Kami menetapkan G20 sebagai forum utama untuk kerja sama ekonomi global, dan hari ini kami menegaskan kembali komitmen kami untuk bekerja sama karena kami, sekali lagi, mengatasi tantangan ekonomi global yang serius.
2. Kami bertemu di Bali pada 15-16 November 2022, di saat krisis multidimensi yang tak tertandingi. Kita telah mengalami kehancuran yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, dan tantangan lainnya termasuk perubahan iklim, yang menyebabkan kemerosotan ekonomi, peningkatan kemiskinan, memperlambat pemulihan global, dan menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
3. Tahun ini, kita juga menyaksikan perang di Ukraina berdampak lebih buruk terhadap ekonomi global. Ada diskusi tentang masalah ini. Kami menegaskan kembali posisi nasional kami sebagaimana dinyatakan dalam forum lain, termasuk Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB, yang, dalam Resolusi No. ES-11/1 tanggal 2 Maret 2022, yang diadopsi dengan suara mayoritas (141 suara setuju, 5 menentang, 35 abstain, 12 absen) menyayangkan dengan sangat keras agresi oleh Federasi Rusia terhadap Ukraina dan menuntut penarikan penuh dan tanpa syarat dari wilayah Ukraina. Sebagian besar anggota mengutuk keras perang di Ukraina dan menekankan hal itu menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa dan memperburuk kerentanan yang ada dalam ekonomi global - menghambat pertumbuhan, meningkatkan inflasi, mengganggu rantai pasokan, meningkatkan kerawanan energi dan pangan, dan meningkatkan risiko stabilitas keuangan. Ada pandangan lain dan penilaian berbeda tentang situasi dan sanksi. Menyadari bahwa G20 bukanlah forum untuk menyelesaikan masalah keamanan, kami mengakui bahwa masalah keamanan dapat memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap ekonomi global.
4. Sangat penting untuk menegakkan hukum internasional dan sistem multilateral yang menjaga perdamaian dan stabilitas. Ini termasuk membela semua Tujuan dan Prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mematuhi hukum humaniter internasional, termasuk perlindungan warga sipil dan infrastruktur dalam konflik bersenjata. Penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir tidak dapat diterima. Penyelesaian konflik secara damai, upaya mengatasi krisis, serta diplomasi dan dialog, sangat penting. Zaman sekarang tidak boleh perang.
5. Pada momen kritis ekonomi global saat ini, G20 harus mengambil tindakan yang nyata, tepat, cepat, dan perlu, dengan menggunakan semua alat kebijakan yang tersedia, untuk mengatasi tantangan bersama, termasuk melalui kerja sama kebijakan makro internasional dan kerja sama nyata. Dengan demikian, kami tetap berkomitmen untuk mendukung negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang dan pulau kecil berkembang, dalam menanggapi tantangan global ini dan mencapai SDGs. Sejalan dengan tema Presidensi G20 Indonesia — Pulih Bersama, Pulih Lebih Kuat — kami akan mengambil tindakan terkoordinasi untuk memajukan

agenda pemulihan global yang kuat, inklusif, dan tangguh serta pembangunan berkelanjutan yang menghasilkan lapangan kerja dan pertumbuhan. Dengan mengingat hal di atas, kami akan:

- Tetap gesit dan fleksibel dalam respons dan kerja sama kebijakan ekonomi makro kami. Kami akan melakukan investasi publik dan reformasi struktural, mendorong investasi swasta, dan memperkuat perdagangan multilateral dan ketahanan rantai pasokan global, untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang, transisi yang berkelanjutan dan inklusif, hijau dan adil. Kami akan memastikan kesinambungan fiskal jangka panjang, dengan bank sentral kami berkomitmen untuk mencapai stabilitas harga.
 - Lindungi stabilitas makroekonomi dan keuangan dan tetap berkomitmen untuk menggunakan semua alat yang tersedia untuk memitigasi risiko penurunan, mencatat langkah-langkah yang diambil sejak Krisis Keuangan Global untuk memperkuat ketahanan keuangan dan mendorong keuangan berkelanjutan dan aliran modal.
 - Mengambil tindakan untuk mempromosikan ketahanan pangan dan energi dan mendukung stabilitas pasar, memberikan dukungan sementara dan terarah untuk meredam dampak kenaikan harga, memperkuat dialog antara produsen dan konsumen, dan meningkatkan perdagangan dan investasi untuk kebutuhan ketahanan pangan dan energi jangka panjang, ketahanan dan sistem pangan, pupuk dan energi yang berkelanjutan.
 - Buka investasi lebih lanjut untuk negara berpenghasilan rendah dan menengah serta negara berkembang lainnya, melalui lebih banyak variasi sumber dan instrumen pembiayaan inovatif, termasuk untuk mengkatalisasi investasi swasta, untuk mendukung pencapaian SDG. Kami meminta Bank Pembangunan Multilateral untuk memajukan tindakan untuk memobilisasi dan memberikan pembiayaan tambahan sesuai mandat mereka, untuk mendukung pencapaian SDG termasuk melalui pembangunan berkelanjutan dan investasi infrastruktur, dan menanggapi tantangan global.
 - Berkomitmen kembali untuk mempercepat pencapaian SDGs, mencapai kesejahteraan bagi semua melalui pembangunan berkelanjutan.
6. Kami sangat prihatin dengan tantangan terhadap ketahanan pangan global yang diperburuk oleh konflik dan ketegangan saat ini. Oleh karena itu kami berkomitmen untuk mengambil tindakan mendesak untuk menyelamatkan nyawa, mencegah kelaparan dan malnutrisi, khususnya untuk mengatasi kerentanan negara-negara berkembang, dan menyerukan percepatan transformasi menuju sistem pertanian dan rantai pasokan dan pertanian yang berkelanjutan dan tangguh. Kami berkomitmen untuk melindungi yang paling rentan dari kelaparan dengan menggunakan semua alat yang tersedia untuk mengatasi krisis pangan global. Kami akan mengambil tindakan terkoordinasi lebih lanjut untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan termasuk lonjakan harga dan kekurangan komoditas pangan dan pupuk secara global. Mengingat upaya G20 seperti Program Pertanian dan Ketahanan Pangan Global, kami menyambut inisiatif global, regional, dan nasional dalam mendukung ketahanan pangan, dan khususnya memperhatikan kemajuan yang dibuat oleh Kelompok Penanggulangan Krisis Global Sekretaris Jenderal PBB tentang Pangan, Energi, dan

Keuangan, serta respons ketahanan pangan Grup Bank Dunia dan IMF. Kami menekankan pentingnya membangun Deklarasi G20 Matera, bekerja sama untuk memproduksi dan mendistribusikan pangan secara berkelanjutan, memastikan bahwa sistem pangan berkontribusi lebih baik pada adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, dan menghentikan dan membalikkan hilangnya keanekaragaman hayati, diversifikasi sumber pangan, mempromosikan pangan bergizi untuk semuanya, perkuat rantai nilai pangan global, regional, dan lokal, dan percepat upaya untuk mengurangi kehilangan dan pemborosan pangan. Kami juga akan menerapkan pendekatan One Health, mengintensifkan penelitian ilmu dan teknologi pangan, dan meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan di sepanjang rantai pasokan pangan, khususnya perempuan, pemuda, petani kecil, dan petani marjinal serta nelayan.

7. Kami mendukung upaya internasional untuk menjaga agar rantai pasokan makanan tetap berfungsi dalam keadaan yang menantang. Kami berkomitmen untuk mengatasi kerawanan pangan dengan memastikan aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan pangan dan produk pangan bagi mereka yang membutuhkan, terutama di negara berkembang dan negara kurang berkembang. Kami menegaskan kembali dukungan kami untuk perdagangan pertanian berbasis aturan yang terbuka, transparan, inklusif, dapat diprediksi, dan non-diskriminatif berdasarkan aturan WTO. Kami menyoroti pentingnya meningkatkan prediktabilitas pasar, meminimalkan distorsi, meningkatkan kepercayaan bisnis, dan memungkinkan perdagangan pertanian dan makanan mengalir dengan lancar. Kami menegaskan kembali perlunya memperbarui aturan perdagangan pangan pertanian global dan untuk memfasilitasi perdagangan produk pertanian dan pangan, serta pentingnya tidak memberlakukan larangan ekspor atau pembatasan pangan dan pupuk dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO yang relevan. Kami berkomitmen untuk menjaga pasokan yang berkelanjutan, sebagian didasarkan pada sumber pangan lokal, serta diversifikasi produksi pangan dan pupuk untuk mendukung kelompok yang paling rentan dari gangguan rantai pasokan perdagangan pangan. Kami akan menghindari dampak negatif terhadap ketahanan pangan dengan sengaja. Kami berkomitmen untuk memfasilitasi pasokan kemanusiaan untuk memastikan akses ke makanan dalam situasi darurat dan meminta Negara Anggota PBB dan semua pemangku kepentingan terkait dengan sumber daya yang tersedia untuk memberikan sumbangan dan sumber daya untuk mendukung negara-negara yang paling terkena dampak krisis pangan, sebagaimana diperlukan dan berdasarkan kebutuhan yang dinilai oleh pemerintah negara-negara yang terkena dampak. Kami terus mendukung penghentian kegiatan kemanusiaan dari sanksi dan menyerukan kepada semua negara untuk mendukung tujuan ini, termasuk melalui upaya saat ini di PBB. Kami akan terus memantau secara ketat keadaan ketahanan pangan dan nutrisi global.
8. Kami menyambut baik dua Perjanjian Istanbul yang ditengahi oleh Türkiye dan PBB yang ditandatangani pada 22 Juli 2022 dan terdiri dari Inisiatif Transportasi Aman Gandum dan Bahan Pangan dari Pelabuhan Ukraina (Inisiatif Butir Laut Hitam) dan Nota Kesepahaman antara Federasi Rusia dan Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Mempromosikan Produk Pangan dan Pupuk Rusia ke Pasar Dunia, tentang pengiriman biji-bijian, bahan makanan, dan pupuk/input tanpa hambatan dari Ukraina dan Federasi Rusia, untuk meredakan ketegangan dan mencegah kerawanan pangan global dan kelaparan di negara-negara berkembang. Kami menekankan pentingnya penerapannya secara penuh, tepat waktu, dan berkelanjutan oleh semua pemangku kepentingan terkait, serta seruan Sekretaris Jenderal PBB untuk melanjutkan upaya ini oleh Para Pihak. Dalam konteks ini kami menyoroti upaya-

upaya lain yang memastikan aliran barang pertanian pangan seperti Jalur Solidaritas UE dan sumbangan pupuk Rusia yang difasilitasi oleh Program Pangan Dunia. Selain itu, kami mencatat berbagai prakarsa yang mengatasi kerawanan pangan seperti prakarsa Kelompok Koordinasi Arab.

9. Kami berkomitmen untuk mendukung penerapan praktik dan teknologi inovatif, termasuk inovasi digital dalam sistem pertanian dan pangan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan yang selaras dengan alam serta mempromosikan mata pencaharian petani dan nelayan serta meningkatkan pendapatan, khususnya petani kecil dengan meningkatkan efisiensi, dan pemerataan akses ke rantai pasokan makanan. Kami akan mempromosikan investasi yang bertanggung jawab dalam penelitian pertanian dan sains serta pendekatan berbasis bukti. Kami akan terus memperkuat Sistem Informasi Pasar Pertanian (AMIS) sebagai alat peringatan dini, untuk meningkatkan transparansi pasar pangan dan pupuk/input, mengurangi ketidakpastian pasar, dan mendukung tanggapan kebijakan yang terkoordinasi untuk ketahanan pangan dan gizi, melalui berbagi informasi yang andal dan data dan informasi tepat waktu.
10. Kami meminta Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Kelompok Bank Dunia (WBG) untuk berbagi dengan kami hasil latihan pemetaan mereka tentang kerawanan pangan, yang akan dikonsolidasikan di masa mendatang dengan masukan dari pakar teknis dan organisasi internasional terkait lainnya, dan akan memberikan analisis tanggapan yang sistematis untuk mengatasi ketahanan pangan. Ini akan mengidentifikasi kesenjangan besar dalam respons global; mengkaji variabel dan pendanaan pangan dan gizi; mengkaji pasokan dan permintaan pupuk; dibangun di atas Sistem Informasi Pasar Pertanian G20 (AMIS); dan mengidentifikasi masalah jangka menengah yang memerlukan analisis teknis dan sistemik lebih lanjut. FAO dan WBG akan melaporkan kembali pada Pertemuan Musim Semi 2023.
11. Kami bertemu pada saat krisis iklim dan energi, ditambah dengan tantangan geopolitik. Kami mengalami ketidakstabilan harga energi dan pasar serta kekurangan/gangguan pasokan energi. Kami menggarisbawahi urgensi untuk mengubah dan mendiversifikasi sistem energi dengan cepat, memajukan keamanan dan ketahanan energi, serta stabilitas pasar, dengan mempercepat dan memastikan transisi energi yang bersih, berkelanjutan, adil, terjangkau, dan inklusif serta aliran investasi berkelanjutan. Kami menekankan pentingnya memastikan bahwa permintaan energi global disesuaikan dengan pasokan energi yang terjangkau. Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk mencapai net zero emisi gas rumah kaca/netralitas karbon global pada atau sekitar pertengahan abad, sambil mempertimbangkan perkembangan ilmiah terbaru dan keadaan nasional yang berbeda. Kami menyerukan dukungan berkelanjutan untuk negara-negara berkembang, terutama di negara-negara yang paling rentan, dalam hal menyediakan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern, peningkatan kapasitas, teknologi terkini yang terjangkau dalam domain publik, kerja sama teknologi yang saling menguntungkan, dan mitigasi pembiayaan kegiatan di bidang energi.
12. Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk mencapai target SDG 7 dan berupaya menutup kesenjangan akses energi dan memberantas kemiskinan energi. Menyadari peran kepemimpinan kami, dan dipandu oleh Bali Compact dan Peta Jalan Transisi Energi Bali, kami berkomitmen untuk menemukan solusi untuk mencapai stabilitas, transparansi, dan keterjangkauan pasar energi. Kami akan mempercepat

transisi dan mencapai tujuan iklim kami dengan memperkuat rantai pasokan energi dan keamanan energi, serta mendiversifikasi campuran dan sistem energi. Kami akan dengan cepat meningkatkan penerapan pembangkit listrik nol dan rendah emisi, termasuk sumber daya energi terbarukan, dan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi energi, teknologi pengurangan serta teknologi penghilangan, dengan mempertimbangkan keadaan nasional. Kami menyadari pentingnya untuk mempercepat pengembangan, penyebaran dan penyebaran teknologi, dan adopsi kebijakan, untuk transisi menuju sistem energi rendah emisi, termasuk dengan cepat meningkatkan penyebaran pembangkit listrik bersih, termasuk energi terbarukan, serta energi langkah-langkah efisiensi, termasuk mempercepat upaya penghentian bertahap pembangkit listrik tenaga batubara, sejalan dengan kondisi nasional dan mengakui perlunya dukungan menuju transisi yang adil. Kami akan meningkatkan upaya kami untuk mengimplementasikan komitmen yang dibuat pada tahun 2009 di Pittsburgh untuk menghapus dan merasionalisasi, dalam jangka menengah, subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien yang mendorong konsumsi yang boros dan berkomitmen untuk mencapai tujuan ini, sambil memberikan dukungan yang ditargetkan untuk yang paling miskin dan paling rentan. Kami akan memperkuat kerja sama internasional serta dialog produsen-konsumen yang relevan untuk mengamankan keterjangkauan dan aksesibilitas energi dengan membatasi volatilitas harga energi dan meningkatkan teknologi yang bersih, aman, inklusif, dan berkelanjutan, termasuk mengembangkan interkoneksi energi regional. Kami berkomitmen untuk mempromosikan investasi dalam infrastruktur dan industri yang berkelanjutan, serta teknologi inovatif dan berbagai mekanisme fiskal, pasar, dan peraturan untuk mendukung transisi energi bersih, termasuk, jika sesuai, penggunaan mekanisme penetapan harga dan non-penetapan karbon, dan insentif, sambil memberikan dukungan yang ditargetkan untuk yang paling miskin dan paling rentan.

13. Mengingat peran kepemimpinan kami, kami menegaskan kembali komitmen teguh kami, dalam mengejar tujuan UNFCCC, untuk mengatasi perubahan iklim dengan memperkuat implementasi penuh dan efektif dari Perjanjian Paris dan sasaran suhunya, yang mencerminkan kesetaraan dan prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda dan kemampuan masing-masing mengingat keadaan nasional yang berbeda. Kami akan memainkan peran kami sepenuhnya dalam mengimplementasikan Pakta Iklim Glasgow dan hasil yang relevan dari COP dan CMA sebelumnya, khususnya COP 26, termasuk seruan untuk meninjau kembali dan memperkuat target 2030 di NDC kami, sebagaimana diperlukan agar selaras dengan Perjanjian Paris. Dalam hal ini, kami menyambut baik peningkatan aksi iklim yang dihasilkan dari NDC baru atau yang diperbarui dan mengundang para pihak untuk segera meningkatkan ambisi mitigasi dan adaptasi serta sarana implementasi serta membuat kemajuan dalam kerugian dan kerusakan pada COP 27 yang diadakan di Afrika. Memperhatikan penilaian IPCC bahwa dampak perubahan iklim akan jauh lebih rendah pada kenaikan suhu 1,5°C dibandingkan dengan 2°C, kami memutuskan untuk melakukan upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C. Ini akan memerlukan tindakan dan komitmen yang bermakna dan efektif oleh semua negara, dengan mempertimbangkan pendekatan yang berbeda, melalui pengembangan jalur nasional yang jelas yang menyelaraskan ambisi jangka panjang dengan tujuan jangka pendek dan menengah, dan dengan kerja sama dan dukungan internasional, termasuk keuangan dan teknologi, dan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sebagai pendukung penting, dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

14. Kami menyambut kemajuan hingga saat ini menuju pencapaian Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global (GBF) Pasca 2020. Kami mendesak semua pihak dan negara untuk menyelesaikan dan mengadopsi GBF dengan tujuan mewujudkan Visi 2050 “Hidup selaras dengan Alam” pada bagian kedua COP15 CBD sebagai kerangka kerja yang kuat untuk tindakan dan akuntabilitas untuk menghentikan dan memulihkan hilangnya keanekaragaman hayati oleh 2030 dan, sebagaimana mestinya, memperbarui Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional. Kami menekankan pentingnya mencapai dan mensinergikan tujuan dari ketiga Konvensi Rio. Kami menekankan perlunya tujuan dan target yang jelas dan terukur untuk keanekaragaman hayati dan sarana implementasi dan akuntabilitas. Kami berkomitmen untuk memperkuat tindakan untuk menghentikan dan membalikkan hilangnya keanekaragaman hayati pada tahun 2030 dan meminta Pihak CBD untuk mengadopsi Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global pasca-2020 yang ambisius, seimbang, praktis, efektif, kuat, dan transformatif pada COP-15 di Montreal. Kami mendesak peningkatan mobilisasi sumber daya dari semua sumber, termasuk dari negara dan entitas, untuk menyediakan sumber daya keuangan baru dan tambahan untuk pelaksanaan GBF, setelah dinegosiasikan, termasuk untuk membantu memungkinkan dan mendukung pihak negara berkembang, dan untuk menyelaraskan sektor swasta dan arus keuangan publik dengan tujuan keanekaragaman hayati. Kami akan meningkatkan upaya untuk memerangi hilangnya keanekaragaman hayati, deforestasi, penggurunan, degradasi lahan dan kekeringan, serta memulihkan lahan terdegradasi untuk mencapai netralitas degradasi lahan pada tahun 2030, dan untuk mendukung ambisi G20 untuk mengurangi degradasi lahan hingga 50% pada tahun 2040 pada dasar sukarela. Kami mengakui upaya yang dilakukan oleh sejumlah negara untuk memastikan bahwa setidaknya 30% daratan global dan setidaknya 30% lautan dan lautan global dilestarikan atau dilindungi pada tahun 2030 dan kami akan membantu membuat kemajuan menuju tujuan ini sesuai dengan keadaan nasional. Kami berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dengan mengubah pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan serta meningkatkan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan termasuk dengan mencegah lalu lintas limbah ilegal lintas batas.
15. Kami akan meningkatkan upaya untuk menghentikan dan memulihkan hilangnya keanekaragaman hayati, termasuk melalui Solusi Berbasis Alam dan Pendekatan Berbasis Ekosistem, mendukung mitigasi dan adaptasi iklim, meningkatkan konservasi dan perlindungan lingkungan, penggunaan dan pemulihan berkelanjutan, menanggapi bencana alam, mengurangi degradasi ekosistem, meningkatkan layanan ekosistem dan untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi lingkungan laut dan pesisir. Kami akan terus mempromosikan pembangunan dan gaya hidup berkelanjutan, efisiensi sumber daya, dan ekonomi sirkular untuk meningkatkan keberlanjutan dan bekerja sama dalam berbagi pengetahuan ilmiah, meningkatkan kesadaran, dan peningkatan kapasitas, khususnya untuk memajukan aksi iklim berbasis laut. Kami berkomitmen untuk mengakhiri penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur. Kami menyambut baik Perjanjian multilateral WTO tentang Subsidi Perikanan dan mendorong pemberlakuannya secara cepat. Sejalan dengan Resolusi UNEA 5/14, kami berkomitmen untuk mengembangkan instrumen yang mengikat secara hukum internasional tentang pencemaran plastik, termasuk di lingkungan laut, dengan ambisi menyelesaikan pekerjaan pada akhir tahun 2024. Kami menyoroti kemajuan yang dicapai dan menelepon tentang delegasi yang berpartisipasi untuk mencapai kesepakatan yang ambisius dan berimbang tanpa penundaan tentang instrumen yang mengikat secara hukum internasional di bawah

UNCLOS tentang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di wilayah di luar yurisdiksi nasional, sebagaimana disebutkan dalam Resolusi UNGA 69/292. Kami juga mengakui bahwa ekosistem, termasuk hutan, padang lamun, terumbu karang, ekosistem lahan basah dengan segala keanekaragamannya, termasuk lahan gambut dan mangrove, mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

16. Kami mengakui kebutuhan mendesak untuk memperkuat kebijakan dan memobilisasi pembiayaan, dari semua sumber dengan cara yang dapat diprediksi, memadai, dan tepat waktu untuk mengatasi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi lingkungan termasuk peningkatan dukungan yang signifikan bagi negara-negara berkembang. Kami mengingatkan dan selanjutnya mendesak negara-negara maju untuk memenuhi komitmen mereka untuk mencapai tujuan memobilisasi bersama USD 100 miliar per tahun segera pada tahun 2020 dan hingga 2025 dalam konteks tindakan mitigasi yang berarti dan transparansi implementasi. Kami juga mendukung musyawarah berkelanjutan untuk tujuan terukur bersama yang ambisius dari pembiayaan iklim dari batas bawah USD 100 miliar per tahun untuk mendukung negara-negara berkembang, yang membantu dalam memenuhi tujuan UNFCCC dan implementasi Perjanjian Paris. Kami menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan janji. Kami juga mengingat Pakta Iklim Glasgow yang mendesak negara-negara maju untuk setidaknya menggandakan ketentuan pendanaan iklim bersama mereka untuk adaptasi ke negara-negara berkembang, dari tingkat 2019, hingga 2025, dalam rangka mencapai keseimbangan antara mitigasi dan adaptasi dalam ketentuan peningkatan skala sumber daya keuangan, mengingat Pasal 9 Perjanjian Paris.
17. Dalam rangka memperkuat upaya global untuk mencapai tujuan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan tujuan Perjanjian Paris, serta mengimplementasikan komitmen COP26, kami menegaskan kembali bahwa bauran kebijakan kami menuju netralitas karbon dan bersih nol harus mencakup berbagai mekanisme fiskal, pasar dan peraturan termasuk, jika sesuai, penggunaan mekanisme dan insentif penetapan harga dan non-penetapan harga karbon, dan menghapus dan merasionalkan, dalam jangka menengah, subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien yang mendorong konsumsi yang boros dan berkomitmen untuk mencapai tujuan ini, sambil memberikan dukungan yang ditargetkan kepada yang paling miskin dan paling rentan, dan sejalan dengan keadaan nasional. Kami mengakui risiko ekonomi makro yang berasal dari perubahan iklim dan akan melanjutkan diskusi tentang biaya dan manfaat dari berbagai transisi.
18. Kami berkomitmen untuk mengambil tindakan dalam mendukung transisi yang tertib, adil dan terjangkau untuk mencapai tujuan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 sejalan dengan UNFCCC dan Perjanjian Paris serta dengan konvensi Keanekaragaman Hayati. Kami menyambut baik kemajuan yang dibuat di seluruh G20, organisasi internasional, jaringan dan inisiatif internasional lainnya, dan sektor swasta dalam menangani prioritas Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan G20, yang bersifat sukarela dan fleksibel, dan menyerukan upaya lebih lanjut untuk memajukan Rencana Jalan tindakan yang direkomendasikan yang akan meningkatkan pembiayaan berkelanjutan. Kami menyambut baik pembentukan dashboard online Kelompok Kerja Keuangan Berkelanjutan dan gudang pekerjaan yang relevan, untuk menggambarkan kemajuan yang sedang berlangsung dan masa depan yang dibuat pada Roadmap, dan mendorong anggota untuk berkontribusi secara sukarela, dengan mempertimbangkan keadaan negara. Kami mendukung Laporan Keuangan

Berkelanjutan G20 2022 yang mengartikulasikan rekomendasi praktis dan sukarela untuk yurisdiksi dan pemangku kepentingan terkait dalam mengembangkan kerangka keuangan transisi, meningkatkan kredibilitas komitmen nol bersih lembaga keuangan dan meningkatkan instrumen keuangan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan. Kami juga menyambut diskusi berharga selama Forum Kepresidenan tentang pengungkit kebijakan yang memberi insentif pembiayaan dan investasi untuk mendukung transisi.

19. Kami tetap berkomitmen untuk mempromosikan pemulihan yang sehat dan berkelanjutan yang dibangun untuk mencapai dan mempertahankan Cakupan Kesehatan Universal di bawah SDGs. Sementara pandemi COVID-19 belum berakhir, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini menyatakan cacar monyet sebagai Kepedulian Darurat Kesehatan Masyarakat Internasional (PHEIC) lainnya, memperkuat bahwa ancaman kesehatan internasional selalu ada dan bahwa G20 dan komunitas global yang lebih luas harus datang bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons kolektif kita. Kami menegaskan kembali pentingnya penguatan sistem kesehatan nasional dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat kesiapsiagaan dan memperlengkapi mereka untuk merespons secara efektif. Kami menekankan perlunya akses yang adil terhadap penanggulangan medis pandemi, dan menyambut baik upaya ACT-A, dan mencatat bahwa hasil evaluasi eksternal ACT-A dapat menjadi pelajaran yang berguna untuk diskusi di masa mendatang. Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk memperkuat tata kelola kesehatan global, dengan peran kepemimpinan dan koordinasi WHO serta dukungan dari organisasi internasional lainnya. Kami mendukung pekerjaan Badan Perundingan Antarpemerintah (INB) yang akan menyusun dan menegosiasikan instrumen yang mengikat secara hukum yang harus mengandung elemen yang mengikat secara hukum dan tidak mengikat secara hukum untuk memperkuat PPR pandemi dan kelompok kerja tentang Peraturan Kesehatan Internasional yang akan mempertimbangkan amandemen Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) (2005) mengingat bahwa keputusan akan dibuat oleh Majelis Kesehatan Dunia.
20. Panel Independen Tingkat Tinggi G20, serta WHO dan Bank Dunia memperkirakan ada kesenjangan pembiayaan PPR pandemi tahunan sekitar USD 10 miliar. Seperti yang diprakarsai oleh Presidensi G20 Arab Saudi, Presidensi G20 Italia dan dilanjutkan oleh Presidensi G20 Indonesia, kami menyambut baik penyediaan sumber daya keuangan tambahan, untuk membantu mendanai kesenjangan kritis dalam penerapan IHR (2005) dan meningkatkan kapasitas PPR. Dalam hal ini, kami menyambut baik pembentukan Dana Perantara Keuangan baru untuk PPR Pandemi ('Dana Pandemi') yang diselenggarakan oleh Bank Dunia. Ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan PPR pandemi yang kritis dan membangun kapasitas di tingkat nasional, regional dan global, menambah sumber daya keuangan untuk PPR pandemi, mengkatalisasi investasi pelengkap, dan memfasilitasi pendekatan yang terkoordinasi dan koheren untuk penguatan PPR pandemi. Kami menyambut keanggotaan inklusif dan perwakilan Pandemic Fund dari negara berpenghasilan rendah dan menengah, organisasi masyarakat sipil dan donor, dan mengakui keahlian teknis dan peran koordinasi pusat WHO dalam upaya ini, yang mencerminkan peran kepemimpinannya dalam arsitektur kesehatan global. Kami menghargai kerja Sekretariat yang diselenggarakan oleh Bank Dunia, dengan WHO sebagai pimpinan teknis dan sebagai ketua Panel Penasihat Teknis. Kami menantikan peluncuran panggilan pertama Dana Pandemi untuk proposal sesegera mungkin. Kami

berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas negara-negara berkembang untuk PPR pandemi melalui Dana Pandemi, dan menantikan peninjauan inventarisasi Dana Pandemi pada akhir tahun pertama untuk menarik pelajaran yang dipetik dan memasukkan setiap perubahan yang diperlukan untuk memastikannya beroperasi sesuai dengan dokumen pemerintahannya dan efektif dalam mengisi kesenjangan PPR kritis, dan terus memiliki peran koordinasi sentral untuk WHO, mempertahankan hubungan yang kuat dengan G20, dan mencakup perspektif negara berpenghasilan rendah dan menengah dan mitra non-G20 tambahan dalam pengambilan keputusannya. Kami menghargai janji dari para donor saat ini, berjumlah lebih dari USD 1,4 miliar, dan mendorong janji sukarela tambahan. Kami meminta donor baru untuk bergabung dengan Dana Pandemi, karena mereka mampu.

21. Penting untuk melanjutkan kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan untuk PPR pandemi. Kami memperluas mandat Satuan Tugas, dan meminta Sekretariat Satuan Tugas untuk bekerja dengan ketua bersama Satuan Tugas, Presidensi G20 India yang akan datang, Troika G20, dan anggota G20 untuk menyepakati rencana kerja Satuan Tugas untuk tahun 2023, dengan mempertimbangkan cakrawala perencanaan multi-tahun. Kami berterima kasih kepada WHO karena terus menjadi tuan rumah Sekretariat, dengan dukungan dari Bank Dunia. Pada tahun 2023 Gugus Tugas akan terus diketuai bersama oleh Indonesia dan Italia, mewakili perspektif ekonomi maju dan berkembang, dan akan terus memanfaatkan keahlian dari WHO, Lembaga Keuangan Internasional dan organisasi terkait lainnya, dengan dukungan dari Indian 2023 Kepresidenan G20. Untuk memperluas suara negara-negara berpenghasilan rendah, kami mengundang organisasi-organisasi regional utama untuk bergabung dalam pertemuan-pertemuan Satuan Tugas, sebagaimana mestinya. Kami akan bekerja sama dengan WHO untuk memastikan Gugus Tugas terus melengkapi arsitektur PPR pandemi global dan tidak ada lagi duplikasi dan fragmentasi sistem tata kelola kesehatan global. Menyampaikan mandat dari Deklarasi Pemimpin Roma G20, pada tahun 2023 Gugus Tugas akan terus mengembangkan pengaturan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan, dan berbagi praktik terbaik dan pengalaman dari koordinasi keuangan-kesehatan sebelumnya untuk mengembangkan tanggapan bersama terhadap pandemi, sebagaimana sesuai. Satuan Tugas akan melakukan pekerjaan untuk lebih memahami risiko ekonomi dan kerentanan dari pandemi, dan bagaimana memitigasinya, dengan fokus pada koordinasi keuangan dan kesehatan dalam menanggapi pandemi baru, dengan mempertimbangkan keadaan khusus negara dan mengakui pentingnya pekerjaan lebih lanjut pada sumber daya. mobilisasi. Kami meminta Gugus Tugas untuk melaporkan kembali ke Menteri Keuangan dan Kesehatan pada tahun 2023 tentang perkembangannya.
22. Kami menyadari bahwa imunisasi COVID-19 yang ekstensif adalah barang publik global dan kami akan memajukan upaya kami untuk memastikan akses yang tepat waktu, merata, dan universal ke vaksin, terapi, dan diagnostik (VTD) yang aman, terjangkau, berkualitas, dan efektif. Mengakui adopsi Deklarasi Menteri tentang Tanggapan WTO terhadap Pandemi COVID-19 dan Kesiapsiagaan untuk Pandemi di Masa Depan dan Keputusan Menteri tentang Perjanjian TRIPS pada Konferensi Tingkat Menteri ke-12 WTO (MC12), kami mencatat bahwa, tidak lebih dari enam bulan sejak tanggal Keputusan Menteri tentang Perjanjian TRIPS, anggota WTO akan memutuskan perpanjangannya untuk mencakup produksi dan pasokan diagnostik dan terapeutik COVID-19. Kami tetap berkomitmen untuk menanamkan pendekatan One Health multisektoral dan meningkatkan pengawasan global, termasuk pengawasan

genomik, untuk mendeteksi patogen dan resistensi antimikroba (AMR) yang dapat mengancam kesehatan manusia. Untuk memungkinkan pengawasan patogen global sebagai bagian dari komitmen kami untuk menerapkan IHR (2005), kami mendorong pembagian data patogen secara tepat waktu pada platform bersama dan terpercaya bekerja sama dengan WHO. Kami mendorong pembagian manfaat yang timbul dari pemanfaatan patogen sesuai dengan undang-undang nasional yang berlaku.

23. Kami menyadari kebutuhan untuk memperkuat kapasitas dan kerjasama produksi produk kesehatan lokal dan regional serta jaringan penelitian dan pengembangan global dan regional yang berkelanjutan untuk memfasilitasi akses yang lebih baik ke VTD secara global, terutama di negara berkembang, dan menggarisbawahi pentingnya kemitraan publik-swasta, dan transfer teknologi dan berbagi pengetahuan secara sukarela dan kesepakatan bersama. Kami mendukung pusat Transfer Teknologi Vaksin mRNA WHO serta semua juru bicara di semua wilayah di dunia dengan tujuan berbagi teknologi dan pengetahuan teknis dengan persyaratan sukarela dan disepakati bersama. Kami menyambut baik penelitian bersama dan produksi vaksin bersama, termasuk peningkatan kerja sama di antara negara-negara berkembang. Kami mengakui pentingnya standar teknis dan metode verifikasi bersama, di bawah kerangka IHR (2005), untuk memfasilitasi perjalanan internasional yang mulus, interoperabilitas, dan mengenali solusi digital dan solusi non-digital, termasuk bukti vaksinasi. Kami mendukung kelanjutan dialog dan kolaborasi internasional dalam pembentukan jaringan kesehatan digital global terpercaya sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pencegahan dan respons terhadap pandemi di masa depan, yang harus memanfaatkan dan mengembangkan keberhasilan standar dan sertifikat digital COVID-19 yang ada.
24. Pandemi COVID-19 telah mempercepat transformasi ekosistem digital dan ekonomi digital. Kami menyadari pentingnya transformasi digital dalam mencapai SDGs. Kami mengakui bahwa konektivitas digital yang terjangkau dan berkualitas tinggi sangat penting untuk inklusi digital dan transformasi digital, sementara lingkungan online yang tangguh, aman, dan terjamin diperlukan untuk meningkatkan keyakinan dan kepercayaan pada ekonomi digital. Kami menyadari pentingnya kebijakan untuk menciptakan ekonomi digital yang memungkinkan, inklusif, terbuka, adil, dan non-diskriminatif yang mendorong penerapan teknologi baru, memungkinkan bisnis dan wirausaha berkembang, serta melindungi dan memberdayakan konsumen, sambil mengatasi tantangan, terkait dengan kesenjangan digital, privasi, perlindungan data, hak kekayaan intelektual, dan keamanan online. Kami mengakui pentingnya melawan kampanye disinformasi, ancaman dunia maya, penyalahgunaan online, dan memastikan keamanan dalam infrastruktur konektivitas. Kami tetap berkomitmen untuk lebih mengaktifkan aliran bebas data dengan kepercayaan dan mempromosikan aliran data lintas batas. Kami akan memajukan transformasi digital yang lebih inklusif, berpusat pada manusia, memberdayakan, dan berkelanjutan. Kami juga menegaskan kembali peran data untuk pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
25. Kami mendorong kolaborasi internasional untuk lebih mengembangkan keterampilan digital dan literasi digital untuk memanfaatkan dampak positif transformasi digital, terutama bagi perempuan, anak perempuan, dan orang-orang dalam situasi rentan, serta mendukung lebih lanjut upaya untuk mengembangkan keterampilan dan literasi yang andal. Kami mencatat meningkatnya permintaan akan tenaga kerja yang mahir dalam memanfaatkan teknologi baru, pendidikan dan pelatihan, pelatihan ulang dan

peningkatan keterampilan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Kami juga berupaya meningkatkan konektivitas dengan mempercepat kapasitas tinggi dan infrastruktur yang aman serta menyediakan sumber daya dan alat yang lebih mudah diakses dan terjangkau, sekaligus meningkatkan keterampilan literasi digital peserta didik, guru, pemimpin sekolah, dan profesional pendidikan lainnya untuk memastikan akses pendidikan universal, mempercepat pemulihan pembelajaran dan mempromosikan pembelajaran seumur hidup.

26. Kami menemukan teknologi digital menjadi kunci untuk pemulihan dan pemberdayaan di berbagai sektor, termasuk dalam membangun sistem pangan dan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan, menciptakan pekerjaan yang berkelanjutan dan layak serta pengembangan kapasitas manusia, mendukung perdagangan inklusif, industrialisasi dan investasi, serta meningkatkan produktivitas. sebagai pembukaan potensi ekonomi masa depan khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan start-up. Sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam upaya kita untuk mengubah masyarakat kita secara digital, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemuda, perempuan, sektor bisnis, lembaga audit, parlemen, ilmuwan, dan buruh.
27. Kami mendukung implementasi yang berkelanjutan dari Peta Jalan G20 untuk Meningkatkan Pembayaran Lintas Batas, termasuk penyampaian perkiraan awal untuk indikator kinerja utama dan Laporan Kemajuan 2022 di masa mendatang yang menetapkan prioritas untuk tahap kerja berikutnya. Kami mendorong bank sentral, otoritas publik lainnya, dan industri pembayaran untuk terus bekerja sama dalam inisiatif penting ini untuk meningkatkan pembayaran lintas batas. Kami menyambut baik laporan Bank for International Settlements (BIS) Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) tentang sistem pembayaran interlinking dan peran Application Programming Interfaces (APIs) yang dipresentasikan dalam lokakarya bersama oleh Presidensi G20 Indonesia dalam koordinasi dengan BIS CPMI dan BIS Innovation Hub (BISIH) tentang pembayaran lintas negara dan interoperabilitas di Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022. Kami juga menyambut baik laporan bersama oleh BIS CPMI, BISIH, IMF, dan Bank Dunia tentang opsi akses dan interoperabilitas Central Bank Digital Currencies (CBDCs) untuk pembayaran lintas batas.
28. Kami mendukung Kerangka Kerja Inklusi Keuangan G20 tentang Memanfaatkan Digitalisasi untuk Meningkatkan Produktivitas dan Mendorong Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif untuk Perempuan, Pemuda dan UMKM atau Kerangka Kerja Inklusi Keuangan Yogyakarta yang dipandu oleh Rencana Aksi Inklusi Keuangan G20 2020. Untuk mengatasi perkembangan digitalisasi dan keuangan berkelanjutan, serta mendukung inklusi dan kesejahteraan keuangan, kami mendukung Prinsip Tingkat Tinggi G20/OECD yang diperbarui tentang Perlindungan Konsumen Keuangan dan menyambut Prinsip Tingkat Tinggi G20/OECD yang diperbarui tentang Pembiayaan UKM.
29. Untuk mendukung ambisi kolektif kita untuk pulih bersama, pulih lebih kuat, kami berkomitmen pada kebijakan yang terkalibrasi dengan baik, terencana dengan baik, dan dikomunikasikan dengan baik untuk mendukung pemulihan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan keadaan spesifik negara. Kami berkomitmen untuk memitigasi dampak buruk untuk mendukung pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Kami akan tetap gesit dan fleksibel dalam respons kebijakan

fiskal kami, siap menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah sesuai kebutuhan. Langkah-langkah sementara dan terarah untuk membantu mempertahankan daya beli kelompok yang paling rentan dan meredam dampak kenaikan harga komoditas, termasuk harga energi dan pangan, harus dirancang dengan baik agar tidak menambah tekanan inflasi yang tinggi. Kami akan terus meningkatkan kerja sama kebijakan makro, menjaga stabilitas keuangan dan kesinambungan fiskal jangka panjang, serta melindungi dari risiko penurunan dan limpahan negatif. Kebijakan makroprudensial perlu tetap diwaspadai untuk mengantisipasi meningkatnya risiko sistemik seiring kondisi keuangan yang semakin ketat. Menyadari bahwa banyak mata uang telah bergerak secara signifikan tahun ini dengan volatilitas yang meningkat, kami menegaskan kembali komitmen yang dibuat pada nilai tukar oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pada April 2021. Kami juga menegaskan kembali pentingnya kerja sama global dan menyampaikan apresiasi kami kepada Presidensi G20 Indonesia atas upayanya mempertahankan sistem multilateralisme yang efektif melalui G20.

30. Bank sentral G20 berkomitmen kuat untuk mencapai stabilitas harga, sejalan dengan mandat masing-masing. Untuk itu, mereka memantau dengan cermat dampak tekanan harga terhadap ekspektasi inflasi dan akan terus mengkalibrasi dengan tepat laju pengetatan kebijakan moneter dengan cara yang bergantung pada data dan dikomunikasikan dengan jelas, memastikan bahwa ekspektasi inflasi tetap terjangkau dengan baik, sambil memperhatikan melindungi pemulihan dan membatasi limpahan lintas negara. Independensi bank sentral sangat penting untuk mencapai tujuan ini dan mendukung kredibilitas kebijakan moneter.
31. Kami berkomitmen untuk segera menerapkan paket pajak internasional dua pilar OECD/G20. Kami menyambut kemajuan di Pilar Satu. Kami juga menyambut baik kemajuan pada Aturan Model Pilar Dua Global Anti-Base Erosion (GloBE), yang membuka jalan untuk implementasi yang konsisten di tingkat global sebagai pendekatan umum, dan kami menantikan penyelesaian Kerangka Implementasi GloBE. Kami menyerukan OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) untuk menyelesaikan Pilar Satu, termasuk masalah yang tersisa dan dengan menandatangani Konvensi Multilateral pada paruh pertama tahun 2023, dan untuk menyelesaikan negosiasi Peraturan Subjek Pajak (STTR) di bawah Pilar Dua yang memungkinkan pengembangan Instrumen Multilateral untuk pelaksanaannya. Kami akan bekerja untuk memperkuat agenda pajak dan pembangunan sehubungan dengan Simposium Menteri G20 Juli 2022 tentang Perpajakan dan Pembangunan, dan kami mencatat Peta Jalan G20/OECD tentang Negara Berkembang dan Pajak Internasional. Kami mendukung kemajuan yang dibuat dalam penerapan standar transparansi pajak yang disepakati secara internasional, termasuk upaya regional dan menyambut baik penandatanganan Deklarasi Asia Initiative Bali pada Juli 2022. Kami juga menyambut Kerangka Pelaporan Aset Kripto dan amandemen Standar Pelaporan Bersama, keduanya yang kami anggap sebagai tambahan integral pada standar global untuk pertukaran informasi otomatis. Kami meminta OECD untuk menyelesaikan pekerjaan pada paket implementasi, termasuk jadwal yang memungkinkan, dan mengundang Forum Global tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Keperluan Pajak untuk membangun komitmen dan proses pemantauannya untuk memastikan implementasi kedua paket secara luas oleh yurisdiksi terkait.

32. Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk memperkuat ketahanan keuangan jangka panjang dari arsitektur keuangan internasional, termasuk dengan mempromosikan aliran modal yang berkelanjutan, dan mengembangkan pasar modal mata uang lokal. Kami menyambut revisi Pandangan Kelembagaan IMF tentang Liberalisasi dan Pengelolaan Arus Modal dan berharap untuk melanjutkan diskusi dengan organisasi internasional tentang penerapan kerangka kerja internasional yang koheren untuk penggunaan langkah-langkah manajemen aliran modal, dengan tetap memperhatikan tujuan awal mereka. Kami menantikan kemajuan lebih lanjut dari IMF dalam mengoperasionalkan Kerangka Kerja Kebijakan Terpadu dan menyambut baik laporan Bank for International Settlements (BIS) tentang kerangka kerja stabilitas keuangan makro. Kami menyambut eksplorasi lanjutan tentang bagaimana CBDC berpotensi dirancang untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas, sambil menjaga stabilitas dan integritas sistem moneter dan keuangan internasional. Kami menyambut baik keberhasilan penyelesaian G20 TechSprint 2022, inisiatif bersama dengan BISIH, yang telah berkontribusi pada perdebatan tentang solusi paling praktis dan layak untuk mengimplementasikan CBDC. Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk mempertahankan Jaring Pengaman Keuangan Global yang kuat dan efektif dengan IMF yang kuat, berbasis kuota, dan memiliki sumber daya yang memadai sebagai pusatnya. Kami tetap berkomitmen untuk meninjau kembali kecukupan kuota dan akan melanjutkan proses reformasi tata kelola IMF di bawah General Review of Quotas ke-16, termasuk formula kuota baru sebagai panduan, paling lambat 15 Desember 2023. Kami mencatat kelanjutan pembahasan Kebijakan biaya tambahan IMF.
33. ¹Kami berkomitmen untuk mendukung semua negara yang rentan untuk pulih bersama, pulih lebih kuat. Kami menyambut janji sebesar USD 81,6 miliar melalui penyaluran sukarela Hak Penarikan Khusus (SDR) atau kontribusi yang setara, dan menyerukan janji lebih lanjut dari semua negara yang bersedia dan mampu untuk memenuhi total ambisi global sebesar USD 100 miliar dari kontribusi sukarela untuk negara-negara paling banyak, sedang membutuhkan. Kami menyambut baik operasionalisasi Resilience and Sustainability Trust (RST) untuk membantu negara berpenghasilan rendah, negara bagian kecil, dan negara berpenghasilan menengah yang rentan mengatasi tantangan struktural jangka panjang yang menimbulkan risiko ekonomi makro, termasuk yang berasal dari pandemi dan perubahan iklim. Kami menyambut baik kontribusi sukarela untuk RST dan menyerukan janji tambahan dan kontribusi tepat waktu untuk itu dan untuk Pengurangan Kemiskinan dan Pertumbuhan Trust (PRGT), terutama untuk sumber daya subsidi, untuk memastikan kumpulan kontributor yang luas untuk memenuhi kebutuhan pendanaan. Kami terbuka untuk menjajaki opsi yang layak bagi negara-negara untuk secara sukarela menyalurkan SDR melalui Bank Pembangunan Multilateral (MDB), sambil menghormati kerangka hukum nasional dan kebutuhan untuk mempertahankan status aset cadangan SDR. Kami akan mengeksplorasi berbagai cara, termasuk melalui langkah-langkah pengoptimalan neraca, dan jalan potensial lainnya, untuk memaksimalkan dampak pembangunan MDB. Kami menyambut baik musyawarah awal dan mendesak MDB untuk terus membahas opsi penerapan rekomendasi Tinjauan Independen G20 atas Kerangka Kerja Kecukupan Modal MDB dalam kerangka tata kelola mereka sendiri, dan untuk menyampaikan pembaruan pada Musim Semi 2023. Hal ini akan menginformasikan perkembangan yang sedang berlangsung dari sebuah roadmap

¹ Memperhatikan bahwa salah satu anggota memiliki pandangan yang berbeda tentang masalah utang di paragraf 33, dan menekankan pentingnya perlakuan utang oleh kreditur multilateral seperti MDB.

untuk implementasi rekomendasi, sambil menjaga kesinambungan keuangan jangka panjang MDB, peringkat kredit yang kuat dan status kreditur pilihan. Kami mengucapkan terima kasih atas laporan penutup Tinjauan Kepemilikan Saham 2020 dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) dan menantikan Tinjauan Kepemilikan Saham 2025. Pada saat yang menantang ini, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk meningkatkan upaya kami dalam menerapkan Kerangka Kerja Bersama untuk Perlakuan Utang di luar Inisiatif Penanggulangan Layanan Utang (DSSI) dengan cara yang dapat diprediksi, tepat waktu, teratur, dan terkoordinasi. Kami menyambut kemajuan dalam hal ini, termasuk penyediaan jaminan pembiayaan untuk Zambia. Kami menyambut baik penyelesaian perlakuan utang untuk Chad dan mendorong penyelesaian tepat waktu atas perlakuan utang untuk Zambia pada awal 2023. Kami juga mendorong penyelesaian perlakuan utang untuk Ethiopia di bawah program yang didukung IMF. Kami prihatin dengan memburuknya situasi utang di beberapa negara berpenghasilan menengah yang rentan. Hal ini dapat diatasi dengan koordinasi multilateral yang melibatkan semua kreditur bilateral resmi dan swasta untuk mengambil tindakan cepat untuk menanggapi permintaan mereka atas penanganan utang. Kami menekankan pentingnya bagi kreditur swasta dan kreditur bilateral resmi lainnya untuk berkomitmen untuk memberikan perlakuan utang dengan persyaratan yang setidaknya sama baiknya untuk memastikan pembagian beban yang adil sesuai dengan prinsip perlakuan yang dapat dibandingkan. Kami menegaskan kembali pentingnya upaya bersama oleh semua pelaku, termasuk kreditur swasta, untuk terus berupaya meningkatkan transparansi utang. Kami menyambut baik upaya pemberi pinjaman sektor swasta yang telah menyumbangkan data ke Portal Repositori Data Institut Keuangan Internasional (IIF)/OECD bersama, dan terus mendorong pihak lain untuk juga berkontribusi secara sukarela.

34. Menghadapi prospek ekonomi dan keuangan global yang semakin menantang, kami menggarisbawahi perlunya memperkuat ketahanan sistem keuangan global dan meminta Financial Stability Board (FSB) dan IMF untuk melanjutkan upaya pengawasannya. Kami berkomitmen untuk mempertahankan stabilitas keuangan global, termasuk melalui koordinasi langkah-langkah kebijakan yang berkelanjutan dan penerapan standar internasional. Kami menyambut baik laporan akhir FSB tentang strategi keluar sektor keuangan dan dampak buruk COVID-19 dan kesimpulannya mengenai masalah stabilitas keuangan pada akhir tahun 2022. Kami sangat mendukung tindakan kebijakan global untuk meningkatkan ketahanan, khususnya terhadap limpahan lintas batas, termasuk dengan mengatasi kerentanan struktural yang teridentifikasi dalam intermediasi keuangan non-bank (LKNB) dari perspektif sistemik. Untuk itu, kami menyambut baik laporan kemajuan LKNB FSB dengan usulan kebijakan untuk mengatasi risiko sistemik di LKNB, termasuk dalam dana terbuka. Kami menyambut baik laporan dari Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), BIS Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI), dan International Organization of Securities Commissions (IOSCO) tentang tinjauan praktik margining. Kami mendukung pelaksanaan Peta Jalan FSB yang diperbarui untuk mengatasi risiko keuangan terkait iklim yang melengkapi Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan G20. Data yang konsisten secara global diperlukan untuk mengatasi risiko keuangan terkait iklim secara efektif. Kami menantikan finalisasi standar oleh International Sustainability Standards Board (ISSB) untuk mendukung pengungkapan keuangan terkait iklim yang konsisten, dapat dibandingkan, dan andal secara global, serta pekerjaannya di luar iklim, dan kami menyambut baik upaya untuk mencapai interoperabilitas di seluruh kerangka pengungkapan. Kami menyambut baik laporan

kemajuan FSB dalam mencapai pengungkapan keuangan terkait iklim yang konsisten dan dapat dibandingkan serta laporan akhir tentang pendekatan pengawasan dan regulasi terhadap risiko terkait iklim. Kami menyambut baik laporan FSB dan Network for Greening the Financial System (NGFS) tentang analisis skenario iklim oleh yurisdiksi.

35. Kami menyambut baik pekerjaan berkelanjutan oleh FSB dan pembuat standar internasional untuk memastikan bahwa ekosistem aset kripto, termasuk apa yang disebut stablecoin, dipantau secara ketat dan tunduk pada regulasi, pengawasan, dan pengawasan yang kuat untuk memitigasi potensi risiko terhadap stabilitas keuangan. Kami menyambut pendekatan yang diusulkan FSB untuk membangun kerangka kerja internasional yang komprehensif untuk regulasi aktivitas aset kripto berdasarkan prinsip 'aktivitas yang sama, risiko yang sama, regulasi yang sama'. Kami menyambut baik laporan konsultatif FSB tentang tinjauan rekomendasi tingkat tinggi untuk regulasi, pengawasan, dan pengawasan pengaturan "global stablecoin". Kami juga menyambut baik laporan konsultasi FSB tentang mempromosikan konsistensi internasional dari pendekatan pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas dan pasar aset kripto. Sangatlah penting untuk membangun kesadaran publik akan risiko, untuk memperkuat hasil peraturan dan untuk mendukung arena permainan yang setara, sembari memanfaatkan manfaat inovasi. Kami menyambut panduan akhir dari BIS CPMI dan IOSCO yang menegaskan bahwa Prinsip Infrastruktur Pasar Keuangan berlaku untuk pengaturan stablecoin yang penting secara sistematis. Kami menyambut laporan konsultasi FSB untuk mencapai konvergensi yang lebih besar dalam pelaporan insiden dunia maya, dan menantikan laporan akhir. Kami menyambut baik hasil tahap kedua Inisiatif Kesenjangan Data (DGI-2) dan akan terus bekerja sama dengan mitra dalam mengatasi tantangan tersisa yang teridentifikasi. Kami menyambut baik rencana kerja Data Gaps Initiative (DGI) baru yang disiapkan oleh IMF, FSB dan Inter-Agency Group on Economic and Financial Statistics (IAG) bekerja sama dengan anggota yang berpartisipasi. Kami meminta IMF, FSB, dan IAG untuk mulai bekerja mengisi kesenjangan data ini dan melaporkan kembali kemajuannya pada paruh kedua tahun 2023, mencatat bahwa targetnya ambisius dan pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kapasitas statistik nasional, prioritas, dan keadaan negara serta menghindari tumpang tindih dan duplikasi di tingkat internasional. Kami menyambut baik kemajuan pekerjaan tinjauan Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD, termasuk laporan kedua dan konsultasi publik yang sedang berlangsung, dan menantikan pembaruan lebih lanjut tentang tinjauan tersebut.
36. Kami menegaskan kembali bahwa sistem perdagangan multilateral (MTS) yang berbasis aturan, tidak diskriminatif, bebas, adil, terbuka, inklusif, setara, berkelanjutan, dan transparan, dengan WTO sebagai intinya, sangat diperlukan untuk memajukan tujuan bersama kami dalam pertumbuhan inklusif, inovasi, penciptaan lapangan kerja dan pembangunan berkelanjutan di dunia yang terbuka dan saling terhubung serta untuk mendukung ketahanan dan pemulihan ekonomi global yang tertekan akibat COVID-19 dan gangguan rantai pasokan global. Kami setuju bahwa reformasi WTO adalah kunci untuk memperkuat kepercayaan terhadap MTS. Kami akan terus memastikan lapangan permainan yang setara dan persaingan yang adil untuk mendorong lingkungan perdagangan dan investasi yang menguntungkan bagi semua. Kami mencatat pentingnya kontribusi MTS untuk mempromosikan Agenda PBB 2030 dan SDG-nya. Memuji keberhasilan kesimpulan Konferensi Menteri WTO ke-12 (MC12), kami berkomitmen untuk memanfaatkan dan memajukan momentum positif dengan terlibat dalam diskusi yang aktif, konstruktif, pragmatis, dan fokus pada

reformasi WTO untuk meningkatkan semua fungsinya, termasuk reformasi penyelesaian perselisihan. mekanisme, di jalur menuju MC13.

37. Kami berkomitmen untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi internasional untuk mengatasi masalah rantai pasokan dan menghindari gangguan perdagangan. Kami percaya bahwa kebijakan perdagangan dan iklim/lingkungan harus saling mendukung dan konsisten dengan WTO serta berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Kami juga menyadari pentingnya kerja sama internasional yang inklusif dalam perdagangan digital. Kami menyadari perlunya mempromosikan nilai tambah melalui investasi yang berkelanjutan dan inklusif di sektor-sektor yang sangat produktif seperti manufaktur hilir, perdagangan digital, dan jasa, serta untuk mendorong hubungan antara investor asing dan perusahaan lokal khususnya UMKM. Kami mencatat inisiatif dari Kepresidenan Indonesia untuk mengadakan diskusi tentang koherensi kebijakan antara perdagangan, investasi, dan industri, dan untuk terus menangani masalah terkait industri dalam proses G20 yang lebih luas, sebagaimana mestinya.
38. Kami menyadari pentingnya merevitalisasi investasi infrastruktur dengan cara yang berkelanjutan, inklusif, dapat diakses, dan terjangkau. Kami mendukung Kerangka Kerja G20/GI Hub yang sukarela dan tidak mengikat tentang Cara Terbaik Memanfaatkan Partisipasi Sektor Swasta untuk Meningkatkan Investasi Infrastruktur Berkelanjutan yang akan mempertimbangkan keadaan negara, dan yang akan melengkapi investasi dari sumber lain, termasuk investasi publik dan pembiayaan yang disediakan oleh MDB. Kami mencatat Dokumen Hasil dari Dialog Investor Infrastruktur G20 2022. Untuk meningkatkan inklusi sosial dan mengatasi kesenjangan daerah, kami mendukung Perangkat Kebijakan G20-OECD tentang Memobilisasi Pendanaan dan Pembiayaan untuk Investasi Infrastruktur yang Inklusif dan Berkualitas di Daerah dan Kota, yang disiapkan dengan dukungan Asian Development Bank (ADB). Kami mencatat Laporan Temuan Awal tentang Pendekatan Inklusif Gender dalam Partisipasi Swasta dalam Infrastruktur dalam mempromosikan pertimbangan gender selama siklus hidup infrastruktur dan menantikan laporan akhir. Kami mendukung InfraTracker 2.0 yang akan memungkinkan sektor publik dan swasta menuju investasi infrastruktur transformatif pasca-COVID-19, dengan memberikan wawasan tentang strategi dan rencana infrastruktur jangka panjang. Untuk mempersempit kesenjangan digital, kami mendukung G20 Compendium of Case Studies on Digital Infrastructure Finance: Issues, Practices and Innovations. Kami mendukung Indikator Investasi Infrastruktur Berkualitas (QII) dan catatan panduan terkait, yang dikembangkan untuk G20, yang bersifat sukarela dan tidak mengikat serta mempertimbangkan keadaan negara, dan kami menantikan diskusi lebih lanjut tentang bagaimana indikator QII dapat diterapkan. Kami menyambut baik kemajuan yang dicapai dalam mengembangkan kemungkinan model tata kelola baru untuk Pusat Infrastruktur Global (GI Hub) dan meminta prinsip-prinsip untuk memandu proses diselesaikan sesegera mungkin.
39. Munculnya otomatisasi dan teknologi digital membentuk kembali dunia kerja, menghadirkan peluang dan tantangan. Menambah situasi, pandemi COVID-19 telah memperburuk ketidaksetaraan yang sudah ada sebelumnya di banyak negara dan terus memengaruhi perempuan, pemuda, pekerja lanjut usia, penyandang disabilitas, dan pekerja migran secara tidak proporsional. Kami menggarisbawahi bahwa tetap menjadi prioritas utama kami untuk memitigasi dampak negatif dari tren saat ini di pasar tenaga kerja, mengurangi ketidaksetaraan sambil merespons secara efektif

peluang yang dihadirkan oleh otomasi dan teknologi digital serta mempromosikan kesetaraan gender. Kami tetap berkomitmen pada promosi pekerjaan yang layak dan penghapusan pekerja anak dan kerja paksa.

40. Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk mendukung inklusi penuh migran, termasuk pekerja migran, pengungsi, dalam upaya pemulihan kami, dalam semangat kerja sama internasional dan sejalan dengan kebijakan, undang-undang, dan keadaan nasional, memastikan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia dan fundamental mereka. kebebasan terlepas dari status migrasi mereka. Kami juga menyadari pentingnya mencegah arus migrasi tidak teratur dan penyelundupan migran, sebagai bagian dari pendekatan menyeluruh untuk migrasi yang aman, tertib dan teratur, sembari menanggapi kebutuhan kemanusiaan dan akar penyebab perpindahan. Kami mendukung penguatan kerjasama antar negara asal, transit, dan tujuan. Kami akan melanjutkan dialog tentang migrasi dan pemindahan paksa dalam Presidensi mendatang.
41. Kami tetap berkomitmen pada pendekatan yang berpusat pada manusia, inklusif, adil, dan berkelanjutan yang mengarah pada keadilan sosial yang lebih besar, pekerjaan yang layak, dan perlindungan sosial untuk semua. Kami akan melanjutkan pekerjaan kami untuk mengintegrasikan penyandang disabilitas, perempuan, dan kaum muda lintas sektor dan tingkatan dalam mengejar pasar tenaga kerja yang inklusif. Kami bertekad untuk mempromosikan pengembangan kapasitas manusia, pasar tenaga kerja, dan produktivitas yang berkelanjutan, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan kejuruan berbasis masyarakat, untuk memajukan penciptaan lapangan kerja melalui kewirausahaan, untuk memberdayakan UMKM, dan untuk mempercepat upaya kami untuk mendorong dan mengadaptasi perlindungan tenaga kerja untuk semua pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal. Kami akan memaksimalkan pendekatan kami terhadap pengembangan keterampilan untuk merespons kebutuhan pasar tenaga kerja secara efektif, dengan melibatkan mitra sosial. Kami akan mempercepat kemajuan menuju Antalya Youth Goal, serta perlindungan sosial universal untuk semua pada tahun 2030.
42. Kami sangat prihatin bahwa krisis multidimensi, termasuk pandemi COVID-19, serta kurangnya ruang fiskal dan ketidaksetaraan akses ke keuangan dan teknologi, menimbulkan tantangan signifikan untuk mewujudkan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Agenda Aksi Addis Ababa dalam sebuah tepat waktu. Kami akan menunjukkan kepemimpinan dan mengambil tindakan kolektif untuk mengimplementasikan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan mempercepat pencapaian SDG pada tahun 2030 dan mengatasi tantangan pembangunan dengan menghidupkan kembali multilateralisme dan reformasi yang lebih inklusif yang ditujukan untuk mengimplementasikan Agenda 2030.
43. Dalam hal ini, kami akan memperkuat pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan serta membangun ketahanan di semua negara berkembang, termasuk SIDS di Pasifik dan Karibia serta LDCs, melalui tindakan yang ambisius dan nyata. Kami juga menegaskan kembali dukungan berkelanjutan kami ke Afrika, termasuk melalui G20 Compact with Africa dan G20 Initiative on Supporting Industrialization in Africa dan LDCs. Kami akan fokus pada UMKM, perlindungan sosial adaptif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Kami menyadari perlunya kemitraan untuk mempromosikan kerja sama teknologi yang saling menguntungkan dan berbagi praktik yang baik, serta perlunya investasi infrastruktur yang inklusif dan berkualitas untuk pemulihan dan ketahanan

yang lebih kuat. Kami menggarisbawahi perlunya mengatasi kesenjangan pembiayaan menuju implementasi Agenda 2030, melalui peningkatan mekanisme pembiayaan inovatif, termasuk keuangan campuran, dengan memperhatikan pentingnya transparansi dan akuntabilitas bersama. Kami mencatat inisiatif seperti Koalisi untuk Infrastruktur Ketahanan Bencana dan Aliansi Keuangan Campuran Global, dan menyambut Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana. Kami menantikan kesuksesan SDGs Summit di tahun 2023.

44. Akses ke pendidikan adalah hak asasi manusia dan alat penting untuk pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kami menyambut baik hasil Transforming Education Summit. Kami akan bertindak dalam solidaritas khususnya dengan negara-negara berkembang untuk membangun kembali sistem pendidikan yang lebih tangguh, berkemampuan teknologi, dapat diakses, dan efektif. Kami akan memberdayakan aktor-aktor yang relevan di dalam dan di luar G20 untuk menghilangkan hambatan pendidikan, meningkatkan lingkungan pengajaran dan pembelajaran, dan mendukung transisi di dalam dan di semua tahap pendidikan, dengan penekanan pada perempuan dan anak perempuan. Kami juga menggarisbawahi pentingnya kesejahteraan peserta didik dalam persiapan mereka untuk bekerja dan partisipasi serta kontribusi yang berarti untuk masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Kami menegaskan kembali pentingnya Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD) dan komitmen kami terhadap SDG4 untuk memastikan pendidikan dan pelatihan berkualitas yang inklusif dan setara. Kami berkomitmen untuk mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat di semua tingkatan di tengah perubahan sifat pekerjaan dan mendorong kemitraan dalam hal ini.
45. Kami menyadari pentingnya riset dan inovasi dalam pemanfaatan sumber daya berkelanjutan di berbagai sektor, terutama di tengah krisis kesehatan, iklim, pangan, dan energi. Kami menyambut baik kerjasama penelitian dan inovasi untuk konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan termasuk ekonomi hijau dan biru. Kami juga mempromosikan kolaborasi inklusif untuk penelitian dan inovasi lebih lanjut, serta mempromosikan mobilitas internasional para peneliti.
46. Karena perempuan dan anak perempuan terus terkena dampak pandemi COVID-19 dan krisis lainnya secara tidak proporsional, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk menempatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai inti dari upaya kami untuk pemulihan inklusif dan pembangunan berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk menerapkan Peta Jalan G20 Menuju dan Melampaui Tujuan Brisbane mendorong inklusi keuangan dan akses ke teknologi digital, termasuk untuk mengatasi distribusi yang tidak merata dalam perawatan berbayar dan tidak berbayar serta pekerjaan rumah tangga, dengan fokus untuk menutup kesenjangan upah gender. Kami berkomitmen untuk penghapusan kekerasan berbasis gender, peningkatan layanan sosial, kesehatan, perawatan dan pendidikan, dan mengatasi stereotip gender. Kami akan terus memajukan akses setara perempuan dan anak perempuan ke pendidikan inklusif dan berkualitas, termasuk partisipasi dalam pendidikan STEM, kewirausahaan perempuan melalui UMKM, dan akses perempuan dan anak perempuan dalam posisi kepemimpinan. Kami akan meningkatkan kualitas hidup perempuan di pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas. Kami menyambut baik pekerjaan yang telah dilakukan oleh Aliansi Pemberdayaan dan

keterlibatannya dengan G20, dan mendukung penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri G20 tentang Pemberdayaan Perempuan di masa mendatang.

47. Kami menegaskan kembali peran penting pariwisata untuk pemulihan global, dan pendekatan berbasis masyarakat untuk membangun kembali sektor pariwisata yang lebih berpusat pada manusia, inklusif, berkelanjutan, dan tangguh. Kami mengakui pentingnya memperkuat mobilitas dan konektivitas internasional yang aman dan perjalanan yang mulus pasca - Covid untuk memungkinkan pemulihan pariwisata. Kami lebih jauh menyadari bahwa ekonomi kreatif, yang melibatkan ekonomi berbasis pengetahuan, kreativitas manusia, dan hak kekayaan intelektual, berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan komunitas lokal pariwisata dan UMKM melalui pengembangan sumber daya manusia, transformasi digital, inovasi, kemitraan publik-swasta, pelestarian berkelanjutan warisan alam dan budaya, dan pembiayaan inovatif dengan tetap mempertahankan nilai komersial dan budaya yang signifikan.
48. Kami menegaskan kembali peran budaya sebagai pendorong dan pendorong pembangunan berkelanjutan dengan nilai intrinsik di luar manfaat sosial dan ekonominya. Kami berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan yang memanfaatkan keanekaragaman budaya sebagai sumber daya untuk kehidupan yang berkelanjutan dan mempromosikan ekosistem yang inklusif dan adil di semua tingkatan yang menghargai kontribusi mereka yang bekerja di sektor budaya, seni, dan warisan. Kami akan menghormati, melindungi, dan melestarikan warisan budaya masyarakat kami, termasuk komunitas lokal dan masyarakat adat, sebagaimana berlaku . Kami mendukung insentif publik dan investasi berkelanjutan dari sektor swasta untuk memperkuat ekonomi budaya. Kami akan melindungi warisan budaya serta memerangi perdagangan gelap kekayaan budaya dan mempromosikan restitusi kepada pemilik/negara asalnya yang sah, sesuai dengan Konvensi UNESCO yang relevan dan undang-undang nasional.
49. Kami akan terus memimpin dengan memberi contoh melalui penguatan dan pelaksanaan kewajiban dan komitmen kami terhadap upaya antikorupsi termasuk melalui instrumen yang mengikat secara hukum, sambil memperbarui komitmen kami untuk tidak menoleransi korupsi. Kami menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas bagi sektor publik dan swasta sebagai bagian penting dari upaya pemulihan bersama. Kami menggarisbawahi peran penting audit serta partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi dalam mencegah dan menanggulangi segala bentuk korupsi. Kami mengingat kembali komitmen kami dan menyerukan kepada semua negara untuk mengkriminalkan penyuapan, termasuk penyuapan pejabat publik asing, dan secara efektif mencegah, memerangi, mendeteksi, menyelidiki, menuntut, dan memberi sanksi penyuapan. Kami selanjutnya akan bekerja untuk memperkuat kerja sama internasional dan kerangka hukum untuk memerangi kejahatan ekonomi termasuk korupsi yang terkait dengan kejahatan terorganisir dan pencucian uang, termasuk, secara sukarela, melalui jaringan dan inisiatif yang ada seperti GlobE dan G20 Denial of Entry Experts Network. Kami akan membagikan informasi tentang tindakan kami terhadap kriminalisasi suap asing dan menegakkan undang-undang suap asing sesuai dengan Pasal 16 UNCAC, dan berharap dapat memperluas partisipasi dalam Konvensi Antisuap OECD, sebagaimana mestinya. Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk menolak perlindungan yang aman bagi pelaku korupsi dan aset mereka, sesuai dengan hukum domestik. Kami juga menyadari pentingnya memitigasi risiko korupsi di semua sektor. Kami akan semakin memperkuat keterlibatan kami dengan dan mendorong partisipasi aktif para

pemangku kepentingan seperti akademisi, masyarakat sipil, media dan sektor swasta, termasuk untuk memajukan budaya integritas.

50. Kami menyadari perlunya komunitas internasional untuk meningkatkan upaya mereka untuk memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi secara efektif. Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk memberikan prioritas strategis dari Financial Action Task Force (FATF) dan FATF Style Regional Bodies (FSRBs) untuk memimpin tindakan global untuk menanggapi ancaman ini. Kami menyambut inisiatif FATF untuk mempromosikan implementasi standar internasional pada aset virtual, khususnya "aturan perjalanan", dan transparansi kepemilikan manfaat, dan mengakui peran mereka dalam perang melawan korupsi sistemik dan kejahatan lingkungan, yang berdampak serius pada ekonomi dan masyarakat. Kami mendukung pekerjaan FATF yang sedang berlangsung untuk meningkatkan upaya global untuk menyita hasil kejahatan dan mengembalikan dana kepada para korban dan negara sejalan dengan kerangka kerja domestik. Kami mendorong semua anggota G20 untuk memperkuat kolaborasi untuk mengadopsi dan menerapkan standar FATF secara efektif.
51. Kami menyambut baik upaya Kepresidenan Indonesia untuk menyusun beragam pengajuan nasional dan kolaborasi terkoordinasi internasional dari anggota G20, negara undangan, serta organisasi regional dan internasional. Ini telah disajikan dalam "G20 Action for Strong and Inclusive Recovery", sebagaimana dilampirkan. Kami menyerukan tindakan nyata lebih lanjut untuk memberikan momentum dan dampak yang lebih besar pada upaya komunitas internasional untuk pulih bersama dan pulih lebih kuat.
52. Kami menyambut baik hasil dari berbagai kelompok kerja G20 dan pertemuan Tingkat Menteri. Kami menghargai dan berterima kasih kepada Indonesia atas kepresidenannya dan telah berhasil menjadi tuan rumah KTT Pemimpin G20 Bali dan atas kontribusinya pada proses G20. Kami berharap dapat bertemu lagi di India pada tahun 2023, di Brasil pada tahun 2024, dan di Afrika Selatan pada tahun 2025.

Kami berterima kasih kepada organisasi internasional, termasuk PBB dan Badan Khususnya, Grup Bank Dunia, IMF, OECD, Bank Pembangunan Asia, ERIA, CEPI, Bank Investasi Eropa, GGGI, ICAO, IEA, IEF, IFAD, ILO, IRENA, FAO, FSB, Gavi, Global Fund, IAEA, Islamic Development Bank, ITU, Medicine Patent Pool, Sustainable Energy for All (SEforAll), OPEC, WEF, WFP, WHO, WTO, UNCCD, UNCTAD, UNDESA, UNDP, UNECE, UNESCAP, UNESCO, UNFCCC, UN Global Pulse, UN Habitat, UNICEF, UNIDO, UNOPS, UN Women, UNWTO dan G20 Engagement Groups (W20, L20, T20, S20, Y20, SAI20, P20, C20, B20, U20) atas masukan dan rekomendasi kebijakan.

Lampiran

A. Pertemuan Menteri dan Dokumen Hasil Kelompok Kerja

1. Communique 1st G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (Jakarta, 17-18 Februari 2022)
2. Ringkasan Ketua Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (Washington DC, 20 April 2022)
3. Chair Summary Note Meeting G20 Agricultural Chief Scientist (MACS-G20) (Bali, 5-7 Juli 2022)
4. Ringkasan Ketua G20 Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 Ketiga (Bali, 15-16 Juli 2022)
5. Ringkasan Ketua Konferensi Tingkat Menteri Pemberdayaan Perempuan (Bali, 24-25 Agustus 2022)
6. Rangkuman Ketua Pertemuan Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim G20 (31 Agustus 2022)
 - a. Lampiran 1: Kemitraan G20 tentang Aksi Berbasis Laut untuk Mitigasi dan Adaptasi Iklim
 - b. Lampiran 2: Studi G20 di bawah Kelompok Kerja Keberlanjutan Iklim
7. Ringkasan Ketua G20 Digital Economy Ministers' Meeting 2022 (Bali, 1 September 2022)
 - a. Lampiran 1: Inventarisasi Konsep yang Diperluas dan Pemahaman Bersama tentang Konektivitas Digital
 - b. Lampiran 2: Kumpulan Kebijakan dan Rekomendasi untuk Meningkatkan Partisipasi Bermakna Masyarakat dalam Situasi Rentan dalam Ekonomi Digital
 - c. Lampiran 3: Laporan tentang Mengidentifikasi Pemberdaya Utama pada Identitas Digital
8. Rangkuman Ketua G20 Pertemuan Menteri Pendidikan (Bali, 1 September 2022)
9. Rangkuman Ketua G20 Pertemuan Menteri Transisi Energi 2022 (Bali, 2 September 2022)
 - a. Kompak Bali
 - b. Dekade Aksi: Peta Jalan Transisi Energi Bali
 - c. Inventarisasi Akses, Teknologi dan Keuangan
 - d. Rangkuman Side Event G20 2022 Energy Transitions Working Group
10. Rangkuman Ketua G20 tentang Multilateralisme untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Belitung, 8 September 2022)
 - a. Peta Jalan G20 untuk Pemulihan dan Ketahanan yang Lebih Kuat di Negara Berkembang, termasuk Negara Tertinggal dan Negara Berkembang Kepulauan Kecil
 - b. Prinsip G20 untuk Meningkatkan Pendanaan Campuran di Negara Berkembang, termasuk Negara Terbelakang dan Negara Berkembang Kepulauan Kecil
 - c. G20 Bali Update 2022 Rencana Aksi G20 Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Komitmen Pembangunan G20
11. Culture for Sustainable Living: Ringkasan Ketua Pertemuan Menteri Kebudayaan G20 (Borobudur, 13 September 2022)
12. Rangkuman Ketua G20 Pertemuan Menteri Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan 2022 (Bali, 13-14 September 2022)
 - a. Rekomendasi Kebijakan G20 untuk Pertumbuhan dan Produktivitas Berkelanjutan dalam Pengembangan Kapasitas Manusia melalui Penguatan Pelatihan Kejuruan Berbasis Komunitas (CBVT)
 - b. Prinsip Kebijakan G20 tentang Mengadaptasi Perlindungan Tenaga Kerja untuk Perlindungan yang Lebih Efektif dan Peningkatan Ketahanan bagi Semua Pekerja

- c. Rekomendasi Kebijakan Mempromosikan Kewirausahaan dan Mendukung UMKM Sebagai Instrumen Penciptaan Lapangan Kerja
- d. Rencana Aksi Percepatan dan Pemantauan Prinsip G20 untuk Integrasi Pasar Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas
- e. Pembaruan Strategi Keterampilan G20
13. Ringkasan Ketua G20 Pertemuan Menteri Perdagangan, Investasi dan Industri (Bali, 22-23 September 2022)
 - a. Prinsip Panduan Tidak Mengikat untuk Mendukung Sistem Perdagangan Multilateral untuk Pencapaian SDGs
 - b. Kompendium G20 tentang Mempromosikan Investasi untuk Pembangunan Berkelanjutan (Bali Compendium)
14. Rangkuman Ketua Pertemuan Menteri Pariwisata G20 2022
 - a. Bali Pedoman Penguatan Masyarakat dan UMKM sebagai Agen Transformasi Pariwisata – Pemulihan Berpusat pada Masyarakat
15. Chair's Summary Pertemuan Menteri Pertanian G20 "Menyeimbangkan Produksi dan Perdagangan Pangan untuk Memenuhi Pangan untuk Semua (Bali, 28 September 2022)
16. High Level Principles Peningkatan Peran Audit dalam Penanganan Korupsi (29 Juli 2022)
17. Catatan Latar Belakang Mitigasi Risiko Korupsi dalam Energi Terbarukan (11 November 2022)
18. Kompendium Praktik Baik Partisipasi Publik dan Pendidikan Antikorupsi (11 November 2022)
19. Kompendium Praktik Baik Kerangka Peraturan dan Tindakan Pengawasan bagi Profesional Hukum untuk Memitigasi Risiko Pencucian Uang Terkait Korupsi (11 November 2022)
20. Laporan Akuntabilitas G20 ACWG (12 November 2022)
21. Pertemuan Menteri Keuangan dan Pertanian Bersama G20: Ringkasan Ketua Kepresidenan G20 (Washington DC, 11 Oktober 2022)
22. Rangkuman Ketua G20 Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 Keempat (Washington DC, 12-13 Oktober 2022)
23. Chair's Summary Meeting Menteri Kesehatan: Aksi Menteri Kesehatan G20 untuk Memperkuat Arsitektur Kesehatan Global (Bali, 27-28 Oktober 2022)
 - a. Ringkasan Kebijakan One Health G20 Lombok
 - b. Ajakan Bertindak tentang Pembiayaan untuk Respons TB
 - c. Ajakan untuk Bertindak pada Resistensi Antimikroba
24. Ringkasan Ketua Pertemuan Menteri Keuangan-Kesehatan G20 (Bali, 13 November 2022)

B. Aksi G20 untuk Pemulihan yang Kuat dan Inklusif